

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PPKn Materi Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Problem Based Learning* di Kelas VIII-D SMP Negeri 3 Surabaya

Kamisun

email : zizun66@gmail.com
SMP Negeri 3 Surabaya

Abstrak

Salah satu upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan akan baik apabila proses penyampaian dapat dipahami dan dimengerti siswa dengan tidak hanya menguasai materi pengetahuan saja akan tetapi mampu menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan nyata yang memiliki keterkaitan dengan ilmu yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 3 Surabaya dengan cara menerapkan pendekatan *problem based learning* dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Surabaya. Pembelajaran dengan pendekatan *problem based learning* ini untuk mengatasi hambatan yang muncul selama melakukan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas empat tahap yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian kelas VIII-D SMP Negeri 3 Surabaya pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 2018/2019, berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif untuk menghitung nilai rata-rata hasil belajar, selanjutnya nilai rata-rata tersebut dibandingkan antara siklus I dengan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tindakan siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 79,18 (ketuntasan 52,6%), pada siklus II meningkat lagi menjadi 87,87 (ketuntasan 86,8%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pendekatan *problem based learning* dapat meningkatkan hasil belajar PPKn materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia di kelas VIII-D SMP Negeri 3 Surabaya.

Kata Kunci : aktifitas siswa, hasil belajar siswa, *problem based learning*, PPKn

Pendahuluan

Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan suatu negara karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Mulyasa, (2006) “keberhasilan pendidikan adalah tanggung jawab sekolah, masyarakat, dan pemerintah”. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut telah diupayakan oleh berbagai pihak yang terkait. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan

kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

Menurut Achmad Munib (2004) “guru dalam mengajar cenderung monoton, dalam artian mereka hanya memberi informasi (proses satu arah) tanpa ada timbal balik, walaupun ada *feed back* itu biasanya hanya sebuah pertanyaan yang mudah dijawab dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain atau paling tidak merangsang siswa untuk bertanya, dan tidak jarang pula aktifitas tanya jawab yang terjadi terkesan dipaksakan misalnya siswa baru menjawab sebuah pertanyaan apabila sudah mendapat perintah

atau ditunjuk oleh gurunya”. Komunikasi yang terjadi antar siswa masih tergolong rendah sehingga tidak menimbulkan diskusi atau perdebatan yang menarik yang dapat meningkatkan aktifitas berpikir siswa. Kurangnya variasi dalam model pembelajaran juga merupakan salah satu faktor lesunya siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) sehingga berakibat pada tingkat ketuntasan belajar siswa. Tingkat ketuntasan belajar siswa masih dibawah target yang diprogramkan oleh pihak sekolah.

Aktifitas belajar mengajar seperti tersebut diatas akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam standar kompetensi. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka pendidikan yang diselenggarakan dapat dikatakan gagal karena selain tidak mengajak para pembelajar untuk turut aktif, dan kreatif juga hasil evaluasi yang diperoleh selalu dibawah standar ketuntasan belajar. Maka dari itu diperlukan suatu pendekatan yang inovatif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas belajar serta hasil belajar siswa. Pendekatan model *problem based learning* diharapkan dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tiga unsur mutlak peraturan perundang-undangan :

1. Berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat
2. Memiliki sifat memaksa
3. Memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya

Tata Peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan perundang – undangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi. UUD 1945 memuat peraturan-peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintah yang dijalankan oleh para penguasa negara sehingga segala sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan bernegara diatur dalam UUD 1945.

2. Ketetapan MPR
Ketetapan MPR (Tap MPR) artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat ke luar dan ke dalam MPR.
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
 - a. Undang-Undang
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Undang-Undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi melaksanakan UUD 1945
 - b. Perppu
Perppu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah merupakan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang (Pasal 5 ayat 2). Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang
5. Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi
Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Propinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Menurut Taufik (2009), *Problem Based Learning (PBL)* adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. *Problem Based Learning (PBL)* merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar “belajar dan belajar”, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran.

Problem Based Learning (PBL) mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. *Problem Based Learning (PBL)* mempunyai perbedaan penting dengan pembelajaran penemuan. Pada pembelajaran penemuan didasarkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin ilmu dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas dalam ruang lingkup kelas, sedangkan *Problem Based Learning (PBL)* dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna dimana siswa mempunyai kesempatan dalam memilih dan melakukan penyelidikan apapun baik di dalam maupun di luar sekolah sejauh itu diperlukan untuk memecahkan masalah.

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dengan *Problem Based Learning (PBL)* siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan

sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. Jadi *Problem Based Learning* atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.

Metode Penelitian

Tempat Penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah SMP Negeri 3 Surabaya, yang berlokasi di Surabaya, dimana tempat ini sekaligus tempat peneliti melaksanakan tugas mengajar. Alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah peneliti saat ini menjadi salah satu guru yang mengajar di sekolah tersebut sehingga memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Penelitian ini dilaksanakan selama dua (2) bulan mulai bulan September sampai bulan Oktober 2018.

Subyek Penelitian: 1). Siswa kelas VIII D SMPN 3 Surabaya tahun pelajaran 2018 / 2019. 2). Peneliti sebagai guru bidang studi PPKn SMPN 3 Surabaya. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, pemberian tindakan pada siklus pertama berdasarkan pada hasil refleksi awal (prasiklus). Berdasarkan refleksi awal dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui tahapan atau prosedur perencanaan, implementasi tindakan, pengamatan dan evaluasi, dan refleksi dalam setiap siklus 1.

Siklus 1

Siklus 1 terdiri dari :

a. Perencanaan, meliputi:

1. Dokumentasi kondisional meliputi daftar nilai dan lembar observasi
2. Identifikasi masalah, masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya hasil belajar siswa.
3. Membuat skenario pembelajaran
4. Membuat lembar observasi untuk melihat proses pembelajaran di kelas.
5. Menyiapkan rencana pembelajaran.
6. Membuat alat evaluasi untuk mengetahui daya serap hasil belajar siswa.

- b. Implementasi Tindakan; dengan diberikan materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia (satu jam pertama). Kemudian dilakukan tes siklus 1.
- c. Pengamatan, meliputi:
1. Menyiapkan lembar pengamatan untuk memantau kegiatan siswa selama proses pembelajaran.
 2. Mengumpulkan data hasil belajar siswa, baik data pra siklus, latihan maupun hasil tes siklus 1.
- d. Refleksi
Dari hasil penelitian di atas dapat dilakukan analisis dengan cara mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Siklus 2

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 apabila belum ada peningkatan hasil belajar yang diharapkan siklus kedua dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, meliputi:
1. Identifikasi masalah
 2. Rencana tindakan.
Tindakan yang direncanakan adalah melalui pembelajaran PBL sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar.
- b. Pelaksanaan, meliputi:
1. Menyiapkan rencana pembelajaran selanjutnya.
 2. Mengevaluasi hasil belajar siswa melalui tes siklus 2.
- c. Pengamatan, meliputi:
1. Mengkaji kembali hasil dari observasi pada siklus 1
 2. Observasi harus betul-betul mendata kembali hasil observasi pada siklus 1.
- d. Refleksi

Setelah diadakan penelitian siklus 1 dan siklus 2 diperoleh analisis tentang data-data yang akurat, dari hasil penelitian guru dapat melaksanakannya untuk refleksi apakah hasil penelitian menggunakan metode *problem based learning* dapat diterapkan dalam pembelajaran kepada siswa.

Sumber data penelitian adalah siswa kelas SMPN 3 Surabaya. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari :

- a. Hasil tes siklus 1 dan siklus 2, digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa.
- b. Hasil observasi terhadap pelaksanaan atau belajar mengajar.

Cara Pengambilan Data:

- a. Prestasi belajar diperoleh dari nilai atau skor tes.
- b. Situasi KBM pada saat dilaksanakan tindakan diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah bila kemampuan siswa secara klasikal dalam menguasai materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dapat mencapai rata-rata kelas ≥ 80 .

Hasil dan Pembahasan

Dari siklus 1 ke siklus 2 indikator keberhasilan telah tercapai yakni dengan rata-rata hasil tes ≥ 80 . Kondisi awal data sebagai berikut:

Nilai terendah adalah 51, nilai tertinggi adalah 89, dan rata-rata nilai adalah 69,18 dengan tingkat persentase 15,79%. Setelah dilaksanakan penelitian ini, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel Hasil Ulangan Harian Siklus 1 dan Siklus 2

Interval	UH1	UH 2
51 – 60	2	0
61 – 70	5	1
71 – 80	11	4
81 – 90	17	18
91 – 100	3	15
	38	38

Bila digambarkan dalam bentuk diagram blok (Chart) sebagai berikut

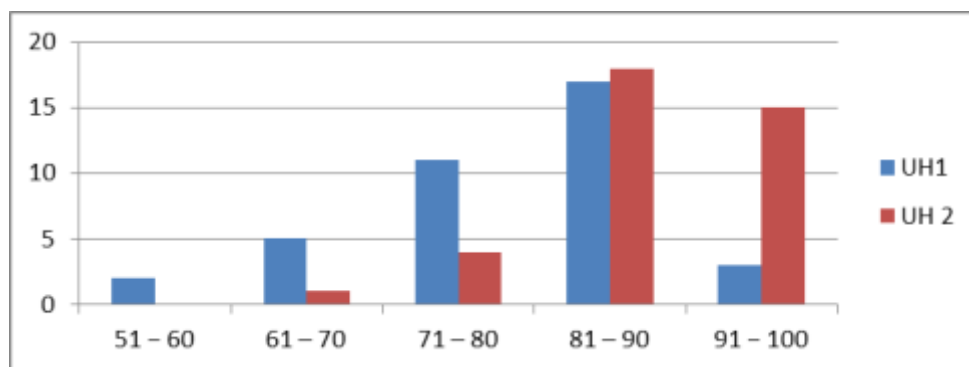


Diagram Blok (Chart) Nilai Ulangan Harian Siklus I dan Siklus II

Dari lembar observer terhadap kemampuan guru dalam mengajar, rata-rata skor pada siklus 1 sebesar 4,64 dan pada siklus 2 sebesar 4,98, sedangkan skor maksimal adalah 5. Keaktifan siswa pada siklus 1 siswa yang aktif sebesar 85,71% dan pada siklus 2 sebesar 100%.

Hasil refleksi atas pelaksanaan siklus 2 adalah sebagai berikut :

Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat, kreatifitas siswa, pemahaman siswa lebih baik dan lebih menghargai pendapat temannya dalam 1 kelompok yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk menghargai pendapat kelompok lain. Siswa lebih percaya diri dan mulai trampil mengerjakan soal- soal, baik soal sebagai tugas rumah maupun soal-soal tes. Dan indikator keberhasilan telah tercapai ($\geq 80\%$). Pada siklus I guru sudah memberikan tindakan khusus terhadap siswa yaitu dengan melakukan model PBL, walaupun demikian hasil tes siklus I belum mengindikasikan keberhasilan dari penelitian ini sekalipun ada peningkatan nilai rata-rata hasil tesnya. Tindakan siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 79,18 (ketuntasan 52,6%), pada siklus II meningkat lagi menjadi 87,87 (ketuntasan 86,8%). Dengan demikian ada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan pembahasan hasil di atas, ternyata metode *problem based learning* (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia pada siswa kelas VIII D SMPN 3 Surabaya.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *problem based learning* dapat meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia pada siswa kelas VIII D SMPN 3 Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam mengajarkan pokok bahasan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia sebagai berikut : 1. Guru PPKn hendaknya secara aktif dan kreatif dapat menggunakan cara cara yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 2. Tindakan kelas yang diberlakukan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bagi guru dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Daftar Pustaka

- Depdikbud, 1985. *Pedoman Metode Penyajian Pendidikan Moral Pancasila dan Penerapannya untuk Guru SMP*, Jakarta: Depdikbud
- Depdiknas. 2006. *Contoh Model Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta : BNSP dan Depdiknas.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 250251. <https://elearningppknsmp.wordpress.com/bab-3-tata-urutan-perundang-undangan> diakses tanggal 1 Juli 2018
- Inten dan Lasmawan. 2005. *Peningkatan Penalaran Nilai Moral dalam dimensi*

Penutup

-
- Pendidikan Kewarganegaraan.*
Bandung : FPIPS-UPI
- M.Taufik Amir, 2009. *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning.*
Jakarta : Media Grup
- Mulyasa. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurkencana, Wayan dan P.P.N. Sunartana, 1992. *Evaluasi Pendidikan.* Surabaya : Usaha Nasional.
- Rochiati W.2006. *Metode Penelitian Kelas Untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Santoso. 2005. *Teori Belajar.* Jakarta.: Penerbit : Balai Pustaka
- Sofyan Anan dkk. 1986. *Pedoman Diktatik Metodik Pendidikan Moral Pancasila.*Jakarta,Balai Pustaka.
- Suharsimi Arikunto,1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakart: PT.Rineka Cipta.
- Sukadi, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokratis berbasis kompetensi untuk sekolah dasr dalam rangka 'National dan Karakter Building''dan Implikasinya terhadap Pembelajaran.* Bandung : FPIPS-UPI
- Trianto, 2007. *Model – Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik.* Jakarta : Prestasi Pustaka
- Wardhani,IGAK.2007.*Penelitian Tindakan Kelas.* Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wina, 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.* Jakarta: Prenada Media Grup
-